

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Latif. 2022. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ali. 2021. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Bambang Waluyo. 2022. Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2023. Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Eva Achjani Zulfa. 2021. Keadilan Restoratif di Indonesia. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Howard Zehr. 2015. The Little Book of Restorative Justice. New York: Good Books.
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Mahrus Ali. 2023. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2021. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. Bandung: Refika Aditama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2019. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. 2021. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Rena Yulia. 2022. Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Romli Atmasasmita. 2021. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1999. Metode Penelitian Hukum. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Topo Santoso. 2022. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif.

ARTIKEL DAN INTERNET

- Andika Putra. 2023. "Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Lalu Lintas di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 12, No. 2.
- Jovansyah Mulya Cipta Wibawa, Rangga Jayanuarto, Sinung Mufti Hangabei, dan Hendi Sastra Putra. 2025. "Restorative Justice in the KUHP and Protection of Sexual Violence Victims." Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 7, No. 1.

Nur Aisyah. 2024. "Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Melalui Pendekatan Restorative Justice." Jurnal Yustisia, Vol. 7, No. 2.

Rizki Pratama. 2023. "Peran Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana melalui Pendekatan Restorative Justice." Jurnal Rechtvinding, Vol. 12, No. 1.

Kementerian Hukum Republik Indonesia. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Diakses melalui <https://jdih.kemenkum.go.id>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Informasi dan Regulasi Kepolisian. Diakses melalui <https://www.polri.go.id>.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Data Kecelakaan Lalu Lintas Nasional. Diakses melalui <https://www.kemenhub.go.id>.

Data Lapangan

Polresta Bengkulu. 2026. Data Penanganan Tindak Pidana Tabrak Lari Tahun 2023–2025. Unit Gakkum Satlantas Polresta Bengkulu.

Satlantas Polresta Bengkulu. 2026. Dokumen dan Arsip Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu.

Hasil Wawancara

Kepala Unit Gakkum Satlantas Polresta Bengkulu. (2026). Wawancara tentang Penyelesaian Tindak Pidana Tabrak Lari Berdasarkan Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wawancara langsung, 10 Juli 2026.

Penyidik Unit Gakkum Satlantas Polresta Bengkulu. (2026). Wawancara tentang Mekanisme Penyidikan dan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Perkara Tabrak Lari. Wawancara langsung, 10 Juli 2026.

Personel Satlantas Polresta Bengkulu. (2026). Wawancara tentang Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dan Upaya Penyelesaian Perkara

melalui Pendekatan Restorative Justice. Wawancara langsung, 11 Juli 2026.

Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Bengkulu. (2026). Wawancara tentang Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Korban dalam Penyelesaian Perkara Tabrak Lari. Wawancara langsung, 11 Juli 2026.

Keluarga Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Kota Bengkulu. (2026). Wawancara tentang Pemberian Ganti Kerugian dan Rasa Keadilan dalam Penyelesaian Perkara Tabrak Lari. Wawancara langsung, 12 Juli 2026.

Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari yang Menempuh Penyelesaian Restorative Justice. (2026). Wawancara tentang Tanggung Jawab Pelaku dan Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian. Wawancara langsung, 12 Juli 2026.

